

Jaringan Pos Baybars: Birokrasi Komunikasi dan Infrastruktur Informasi di Dunia Islam Abad ke-13

Ahmad Bahrul Ma'arif
UIN Sunan Ampel Surabaya
bahrulma3127@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas sistem jaringan pos (*al-barīd*) yang didirikan oleh Sultan al-Zāhir Baybars sebagaimana dicatat oleh al-Maqrīzī dalam *al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyyah*. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana sistem pos tersebut menggambarkan bentuk birokrasi komunikasi dan pengelolaan informasi pada masa pemerintahan Mamluk abad ke-13. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan deskripsi al-Maqrīzī tentang jaringan pos, fungsinya dalam administrasi negara, dan maknanya bagi perkembangan peradaban Islam. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan analisis isi teks sejarah, yaitu menelaah langsung bagian *al-Khiṭaṭ* yang membahas pendirian pos Baybars dan membandingkannya dengan konteks sejarah Mamluk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *al-barīd* berfungsi sebagai sarana komunikasi cepat antara pusat dan daerah, memperkuat kontrol politik, serta menandai kemajuan organisasi birokrasi Islam. Al-Maqrīzī menampilkan jaringan pos ini sebagai simbol keteraturan administrasi dan efisiensi pemerintahan dalam peradaban Islam klasik.

Kata Kunci: *al-khitat, Baybars, Sistem pos, Birokrasi Islam, Mamluk*

PENDAHULUAN

Birokrasi pemerintahan merupakan sistem pengorganisasian negara yang dijalankan secara rasional oleh aktor negara dalam struktur formal yang memiliki aturan, fungsi, dan tujuan jelas, seperti pelayanan publik, pembangunan, dan administrasi negara. Birokrasi dipandang sebagai personifikasi negara yang berperan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun sering kali menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan potensi maladministrasi.¹ Sejarah mencatat bahwa birokrasi bukanlah fenomena baru; ia telah eksis sejak ribuan tahun lalu dan mengalami evolusi dalam berbagai peradaban, termasuk dalam tradisi pemerintahan Islam. Salah satu contoh penting adalah Dinasti Mamluk di abad ke-13 M, di mana Sultan al-Zāhir Baybars merevitalisasi lembaga *al-barīd* yakni sistem pos dan intelijen negara sebagai instrumen birokrasi yang tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga sebagai strategi politik untuk memperkuat otoritas pusat pasca invasi Mongol dan Perang Salib.

Pasca invasi Mongol yang menghancurkan pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad dan wilayah Khurasan, dunia Islam mengalami krisis politik dan kultural yang mendalam. Dinasti Abbasiyah runtuh, dan banyak wilayah Islam porak-poranda akibat

¹ Yudi Rusfiana and Cahya Supriyatna, *MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGANNYA* (Bandung: Alfabeta, 2021). hlm. 1-7.

serangan brutal dari Hulagu Khan dan Timur Lenk. Dalam situasi ini, Mesir muncul sebagai benteng terakhir peradaban Islam yang selamat dan mampu bangkit kembali di bawah Dinasti Mamluk. Para pemimpin Mamluk, yang berasal dari kalangan budak militer, berhasil membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil, serta membendung ancaman eksternal seperti pasukan Salib dan Mongol.² Namun, untuk mempertahankan otoritas atas wilayah yang luas dan beragam termasuk Suriah, Hijaz, dan bagian dari Afrika Utara. Dinasti Mamluk membutuhkan sistem kontrol administratif yang efisien dan terintegrasi. Oleh karena itu, mereka mengembangkan lembaga-lembaga birokrasi yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, termasuk revitalisasi sistem pos negara (al-barīd) di bawah Sultan al-Zāhir Baybars. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan politik dan intelijen, yang memungkinkan pusat kekuasaan di Kairo untuk memantau kondisi wilayah dan mengirimkan perintah secara cepat dan terstruktur. Al-barīd menjadi simbol efisiensi birokrasi dalam menghubungkan pusat kekuasaan dengan wilayah-wilayah yang luas, sekaligus memperlihatkan bagaimana birokrasi menjadi tulang punggung stabilitas dan kontrol pemerintahan dalam konteks kekuasaan Islam klasik. Dengan demikian, baik dalam konteks modern maupun sejarah Islam, birokrasi pemerintahan terbukti sebagai elemen vital dalam menjaga kesinambungan, efektivitas, dan legitimasi negara.

Salah satu tokoh kunci dalam transformasi Dinasti Mamluk menjadi kekuatan politik yang mapan adalah Sultan al-Zāhir Baybars. Meskipun dikenal luas sebagai panglima militer yang berjasa besar dalam mengalahkan pasukan Mongol di Ain Jalut, peran Baybars jauh melampaui medan perang. Ia tampil sebagai konsolidator negara yang membangun fondasi kelembagaan dan memperkuat struktur pemerintahan Mamluk pasca kekacauan politik dan militer. Baybars tidak hanya memulihkan stabilitas internal, tetapi juga mengukuhkan legitimasi dinasti dengan menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Kairo sebagai simbol otoritas religius. Di bawah kepemimpinannya, sistem birokrasi diperkuat, termasuk revitalisasi lembaga al-barīd sebagai alat komunikasi dan pengawasan administratif. Dengan demikian, Baybars meletakkan dasar bagi pemerintahan Mamluk yang terpusat dan berkelanjutan, menjadikannya bukan sekadar pahlawan militer, tetapi juga negarawan yang visioner dalam membangun ulang tatanan politik Islam pasca-Abbasiyah³

Meskipun studi mengenai Dinasti Mamluk telah banyak menyoroti aspek militer, politik, dan peradaban material, kajian tentang dimensi administratif dan infrastruktur komunikasi mereka masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menempatkan Sultan al-Zāhir Baybars sebagai tokoh militer atau simbol kekuasaan simbolik, tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana ia membangun sistem birokrasi yang menopang stabilitas kekuasaan. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti sistem jaringan pos (al-barīd) yang dibangun

² Mundzirin Yusuf, "PERADABAN DINASTI MAMLUK DI MESIR," *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 2015. hlm. 178-183.

³ Amina A. Elbendary, "The Sultan, The Tyrant, and The Hero: Changing Medieval Perceptions of al-Zahir Baybars," *Mamlūk Studies Review*, The Middle East Documentation Center (MEDOC), 2001. hlm. 145-170.

Baybars, sebagaimana dicatat oleh al-Maqrīzī dalam al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyyah. Fokus utamanya adalah bagaimana sistem pos ini mencerminkan bentuk birokrasi komunikasi dan pengelolaan informasi pada abad ke-13, serta bagaimana infrastruktur tersebut berperan dalam memperkuat otoritas pusat dan mempercepat aliran informasi di wilayah kekuasaan Mamluk. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah perspektif baru dalam studi sejarah birokrasi Islam, tetapi juga membuka ruang untuk memahami negara pra-modern sebagai entitas yang sangat bergantung pada teknologi komunikasi dan sistem informasi yang terorganisir.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem jaringan pos (al-barīd) yang dibangun oleh Sultan al-Zāhir Baybars pada abad ke-13 M, sebagaimana dideskripsikan oleh sejarawan Muslim al-Maqrīzī dalam karya monumentalnya al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyyah. Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan secara sistematis bagaimana al-Maqrīzī menggambarkan struktur dan fungsi jaringan pos tersebut dalam konteks administrasi pemerintahan Mamluk, serta menafsirkan makna strategisnya bagi perkembangan peradaban Islam, khususnya dalam hal pengelolaan informasi, komunikasi politik, dan konsolidasi kekuasaan. Dengan menelaah bagian-bagian spesifik dari teks al-Khiṭaṭ yang membahas pendirian dan operasionalisasi sistem pos Baybars, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana birokrasi komunikasi berperan sebagai tulang punggung stabilitas negara dan instrumen kendali atas wilayah kekuasaan yang luas dan beragam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (library research), yang berlandaskan pada pendekatan analisis isi teks sejarah. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menafsirkan sumber-sumber primer berupa karya al-Maqrīzī, serta membandingkannya dengan konteks sejarah Dinasti Mamluk yang relevan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara membaca dan memahami isi teks sejarah secara mendalam. Peneliti menelusuri bagaimana al-Maqrīzī menjelaskan sistem pos (al-barīd) dalam al-Khiṭaṭ, meskipun pembahasannya sangat terbatas dan hanya muncul secara singkat yakni dalam terjemahan Stowasser pada halaman 78 - 81. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penggalian fakta sejarah, tetapi juga mencoba memahami bagaimana al-Maqrīzī menyusun narasi, menggunakan istilah-istilah administratif, dan menggambarkan peran kelembagaan dalam sistem pemerintahan Mamluk. Tujuannya adalah untuk menangkap cara berpikir birokratis yang tercermin dalam teks, serta menafsirkan nilai-nilai dan logika institusional yang mendasari sistem komunikasi negara Islam pada masa itu. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menunjukkan bahwa meskipun sumbernya terbatas, deskripsi al-Maqrīzī tetap dapat memberikan gambaran penting tentang bagaimana informasi dan kekuasaan dikelola secara terstruktur oleh negara Mamluk.

Untuk membangun kerangka teori yang relevan dengan penelitian tentang jaringan pos (al-barīd) Baybars sebagai sistem komunikasi dan pengelolaan informasi dalam pemerintahan Mamluk, pendekatan birokrasi klasik dari Max Weber sangat tepat digunakan. Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang ditandai oleh

hierarki yang jelas, pembagian tugas yang sistematis, aturan formal, dan dokumentasi tertulis, yang memungkinkan efisiensi administratif dalam negara pra-modern.⁴ Dalam konteks Dinasti Mamluk, sistem pos yang dibangun oleh Baybars mencerminkan banyak elemen dari model birokrasi Weberian: adanya struktur hierarkis (otorisasi kerajaan), spesialisasi tugas (pengiring berkuda, pengelola stasiun), serta prosedur komunikasi yang terstandarisasi dan terpusat. Kerangka konsep ini memungkinkan peneliti untuk membaca sistem al-barīd bukan hanya sebagai sarana logistik, tetapi sebagai manifestasi dari rasionalitas administratif dalam negara Islam abad ke-13. Dengan menggunakan teori Weber, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana komunikasi menjadi instrumen kekuasaan, bagaimana informasi dikelola secara sistematis, dan bagaimana struktur birokrasi mendukung stabilitas pemerintahan. Teori ini juga membantu menafsirkan logika institusional yang terkandung dalam teks al-Maqrīzī, seperti pembatasan akses terhadap fasilitas negara dan pentingnya kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Dengan mempertimbangkan latar sejarah Dinasti Mamluk pasca invasi Mongol, peran konsolidatif Sultan al-Zāhir Baybars, serta deskripsi singkat al-Maqrīzī mengenai sistem al-barīd, artikel ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana jaringan pos tersebut berfungsi sebagai instrumen birokrasi komunikasi dan pengelolaan informasi dalam pemerintahan Islam abad ke-13. Melalui pendekatan analisis isi teks sejarah dan kerangka teori birokrasi klasik, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa sistem al-barīd bukan sekadar sarana logistik, melainkan bagian dari infrastruktur negara yang menopang stabilitas kekuasaan dan rasionalitas administratif. Artikel ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang dinamika birokrasi dalam sejarah Islam, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kajian kelembagaan dan komunikasi pemerintahan pra-modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap teks al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyyah yang menjadi sumber primer utama dalam penelitian ini. Fokus pembahasan diarahkan pada sistem pos (al-barīd) yang dibangun oleh Sultan al-Zāhir Baybars sebagai bagian dari struktur komunikasi pemerintahan Mamluk. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis teori birokrasi klasik Max Weber, yang memungkinkan pembacaan sistem al-barīd sebagai manifestasi rasionalitas administratif dan kontrol politik dalam negara Islam abad ke-13. Pembahasan dibagi ke dalam tiga subbagian utama yang mencakup: deskripsi historis sistem pos pada masa Baybars, fungsinya sebagai alat komunikasi dan pengawasan kekuasaan, serta simbolisme birokrasi Islam dalam kerangka rasionalitas administratif.

Sejarah Sistem al-Barīd pada Masa Baybars

⁴ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press, 1978). hlm. 956.

Dalam al-Khiṭaṭ al-Maqrīziyyah, al-Maqrīzī memberikan catatan penting mengenai inisiatif Sultan al-Zāhir Baybars dalam membangun sistem jaringan pos (al-barīd) yang terorganisir dan mencakup jalur-jalur utama antara Mesir dan Suriah. Menurut al-Maqrīzī, Baybars menetapkan sistem relay yang memungkinkan pesan dikirim dari Benteng Kairo ke Damaskus dan kembali dalam waktu empat hari. Efisiensi ini memungkinkan sultan menerima laporan dari berbagai provinsi dua kali dalam seminggu, sehingga ia dapat mengambil keputusan administratif secara cepat dan terpusat tanpa harus meninggalkan pusat kekuasaannya. Sistem ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis dalam pengelolaan komunikasi jarak jauh, tetapi juga mencerminkan keseriusan Baybars dalam membangun struktur pemerintahan yang responsif dan terkoordinasi. Al-Maqrīzī menekankan bahwa Baybars menginvestasikan dana besar untuk menyempurnakan sistem ini, hingga akhirnya rampung pada tahun 659 H / 1261 M. Pembangunan al-barīd ini menjadi salah satu pencapaian administratif yang menandai transisi dari kekuasaan militer ke bentuk birokrasi yang lebih sistematis dalam pemerintahan Mamluk⁵

Konteks pendirian sistem pos oleh Baybars tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dunia Islam pasca kehancuran Baghdad pada tahun 1258 M oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan. Serangan tersebut tidak hanya mengakhiri kekuasaan Dinasti Abbasiyah, tetapi juga menciptakan kekosongan otoritas politik yang mendalam di wilayah Islam. Dalam kondisi inilah Dinasti Mamluk di Mesir muncul sebagai kekuatan baru yang berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan membangun kembali struktur pemerintahan yang stabil dan terorganisir. Pendirian jaringan al-barīd oleh Baybars dapat dipahami sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan dan rekonstruksi birokrasi pasca-Abbasiyah. Sebagaimana dicatat oleh Ibnu Hajar, kejatuhan Baghdad telah menimbulkan keputusan politik yang luas, yang kemudian perlahan dipulihkan melalui kemunculan tiga kerajaan besar: Mamluk, Syafawi, dan Ottoman. Ketiga dinasti ini memainkan peran penting dalam membentuk ulang lanskap kekuasaan Islam dan memperkenalkan model pemerintahan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada efisiensi administratif.⁶

Struktur teknis sistem al-barīd yang dibangun oleh Baybars menunjukkan tingkat kompleksitas dan keteraturan administratif yang tinggi. Setiap stasiun relay dilengkapi dengan sejumlah kuda pos yang siap digunakan, serta tenaga pendukung seperti para pengiring berkuda yang disebut sawwāqūn. Tugas mereka adalah mendampingi dan menangani kebutuhan perjalanan bagi individu yang memiliki izin resmi untuk menggunakan fasilitas pos kerajaan. Al-Maqrīzī menegaskan bahwa tidak semua orang dapat mengakses layanan ini; hanya mereka yang memiliki otorisasi langsung dari sultan atau yang menjalankan urusan resmi pemerintahan yang diperbolehkan memanfaatkan kuda pos dan pengiringnya. Dalam beberapa kasus, bahkan para pejabat tinggi pun harus memperoleh izin khusus untuk menggunakan jalur ini. Selain itu, setiap stasiun juga

⁵ Karl Stowasser, *Al-Maqrīzī: Book of Exhortations and Useful Lessons in Dealing with Topography and Historical Remains (al-Khiṭaṭ). Parts I-II*, A compte d'auteur, Liège, Belgium, 2022. hlm. 80-81

⁶ Imam Ibnu Hajar, "FROM ZERO TO HERO: THE HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE (1299-1566 AD)," *Proceeding of ADIA*, July 9, 2024. hlm. 392.

menyediakan logistik perjalanan seperti makanan, air, dan perlengkapan lainnya, serta menjamin keamanan bagi para pelintas. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai infrastruktur negara yang menopang mobilitas pejabat dan distribusi informasi secara terpusat dan terkendali.⁷

Salah satu aspek menarik yang juga dicatat oleh al-Maqrīzī adalah tingkat keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem al-barīd. Ia menyebut bahwa pada masa mudanya, seorang perempuan dapat melakukan perjalanan dari Kairo ke Damaskus seorang diri, baik dengan berjalan kaki maupun berkendara, tanpa perlu membawa bekal makanan atau air. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun-stasiun pos tidak hanya berfungsi sebagai titik komunikasi, tetapi juga sebagai pusat logistik dan perlindungan bagi para pelintas. Tingkat keamanan yang tinggi ini mencerminkan stabilitas wilayah dan efektivitas sistem administratif yang dibangun oleh Baybars, serta memperkuat citra negara sebagai penyedia layanan publik yang terorganisir dan dapat diandalkan.⁸ Dengan demikian, sistem al-barīd tidak hanya berperan sebagai jaringan transportasi pesan, tetapi juga sebagai fondasi komunikasi pemerintahan yang memungkinkan Baybars menjalankan kekuasaannya secara efisien dan berkelanjutan.

Fungsi Komunikasi dan Kontrol Politik

Sistem al-barīd yang dibangun oleh Sultan al-Zāhir Baybars memiliki fungsi utama sebagai sarana komunikasi cepat antara pusat pemerintahan di Kairo dan wilayah-wilayah provinsi strategis seperti Damaskus. Al-Maqrīzī mencatat bahwa pesan dari Benteng Kairo dapat mencapai Damaskus dalam waktu empat hari dan kembali dalam rentang waktu yang sama, memungkinkan sultan menerima laporan dari daerah dua kali dalam seminggu. Efisiensi ini bukan hanya mencerminkan kemajuan logistik, tetapi juga menunjukkan adanya sistem komunikasi politik yang terstruktur dan terpusat. Dalam konteks pemerintahan Islam klasik, kecepatan dan keteraturan informasi merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas kekuasaan, merespons situasi lokal, dan memperkuat legitimasi otoritas pusat. Sebagaimana dijelaskan oleh Srikiki dan Siagian, komunikasi politik dalam sejarah Islam berfungsi sebagai instrumen penghubung antara pemimpin dan rakyat, serta sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis informasi strategis dan terkontrol.⁹

lain sebagai sarana komunikasi cepat, sistem al-barīd juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan administratif yang efektif dalam pemerintahan Mamluk. Al-Maqrīzī mencatat bahwa melalui jaringan pos ini, Sultan Baybars dapat mengambil keputusan penting terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat daerah secara langsung dari pusat pemerintahan. Informasi yang dikirim melalui jalur pos memungkinkan sultan untuk memantau kondisi politik dan sosial di berbagai wilayah,

⁷ Stowasser, *Al-Maqrīzī*. hlm. 81.

⁸ Ibid.

⁹ Srikiki Srikiki and Haidir Fitrah Siagian, "Komunikasi Politik dalam Sejarah Islam: Komunikasi Politik Rasulullah Saw," *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 2025. hlm. 2.

serta merespons dinamika lokal dengan kebijakan yang tepat waktu. Fungsi pengawasan ini menunjukkan bahwa al-barīd bukan sekadar alat logistik, melainkan bagian integral dari mekanisme kontrol kekuasaan yang terpusat. Dalam konteks birokrasi Islam, sistem komunikasi semacam ini menjadi sarana untuk mempertahankan loyalitas pejabat, mencegah pemberontakan, dan memastikan bahwa perintah pusat dijalankan secara konsisten di tingkat lokal. Sebagaimana dijelaskan dalam studi tentang Dinasti Mamluk, pengawasan administratif melalui jalur komunikasi resmi merupakan salah satu strategi utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan efektivitas otoritas sultan.¹⁰

Di samping fungsi teknis dan administratifnya, sistem al-barīd juga memiliki dimensi simbolik yang penting dalam memperkuat citra kekuasaan pusat. Keberadaan jaringan pos yang terorganisir di wilayah-wilayah strategis seperti antara Kairo dan Damaskus menjadi penanda kehadiran negara secara nyata di ruang geografis yang luas. Sistem ini tidak hanya menghubungkan pusat dan daerah secara fisik, tetapi juga secara politis dan simbolis, menunjukkan bahwa otoritas sultan menjangkau hingga ke wilayah pinggiran. Dalam konteks sejarah Islam pasca-Abbasiyah, simbolisme semacam ini menjadi krusial dalam membangun kembali legitimasi kekuasaan yang sempat runtuh akibat invasi Mongol. Sebagaimana dicatat oleh Ibnu Hajar, kejatuhan Baghdad telah menciptakan keputusan politik yang mendalam, yang kemudian perlahan dipulihkan melalui kemunculan tiga kerajaan besar: Mamluk, Syafawi, dan Ottoman. Ketiga dinasti ini tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga mengembangkan struktur pemerintahan yang terorganisir sebagai simbol keteraturan dan stabilitas politik dalam peradaban Islam klasik.¹¹

Simbol Keteraturan dan Rasionalitas Birokrasi Islam

Setelah membahas fungsi komunikasi dan kontrol politik yang dijalankan melalui sistem al-barīd, pembahasan selanjutnya akan menyoroti bagaimana sistem ini mencerminkan cara berpikir birokratis dalam pemerintahan Mamluk. Pendekatan yang digunakan dalam bagian ini tidak hanya menggali fakta sejarah, tetapi juga mencoba memahami bagaimana al-Maqrīzī menyusun narasi, memilih istilah administratif, dan menggambarkan peran kelembagaan dalam teksnya. Dengan membaca al-Khiṭaṭ secara lebih mendalam, penelitian ini berupaya menangkap logika institusional yang mendasari sistem komunikasi negara Islam saat itu. Dalam kerangka teori birokrasi Max Weber, sistem al-barīd dapat dilihat sebagai bentuk rasionalisasi pemerintahan, di mana informasi dan kekuasaan dikelola secara terstruktur, hierarkis, dan berbasis aturan.

Sistem al-barīd yang dibangun oleh Baybars menunjukkan sejumlah ciri khas birokrasi rasional sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber dalam *Economy and Society*. Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang didasarkan pada aturan formal, hierarki jabatan, pembagian kerja yang jelas, dan sistem dokumentasi yang

¹⁰ - Siti Maryam, "Dinasti Mamluk di Mesir Penyelamat Peradaban Islam 1250-1517 M.," Monograph, Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2022. hlm. 45.

¹¹ Hajar, "FROM ZERO TO HERO.," hlm. 392.

teratur.¹² Semua elemen ini tampak dalam sistem pos Mamluk: stasiun relay berfungsi sebagai unit administratif yang terhubung secara hierarkis, penggunaan fasilitas pos dibatasi oleh otorisasi resmi dari sultan, dan pelaporan berkala dari daerah ke pusat menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang berbasis prosedur. Peran khusus seperti sawwāqūn dan pengelola stasiun mencerminkan spesialisasi tugas dalam sistem pemerintahan. Dengan struktur seperti ini, al-barīd bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari infrastruktur birokrasi yang kompleks dan rasional. Pendirian jaringan pos ini menjadi penting dalam perkembangan administrasi Islam abad ke-13 karena menandai pergeseran dari pola pemerintahan tradisional berbasis patronase menuju sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan berbasis aturan. Dalam konteks ini, sistem al-barīd dapat dipahami sebagai manifestasi awal dari dominasi legal-rasional dalam negara Islam, sebagaimana dipaparkan Weber sebagai bentuk rasionalisasi kekuasaan modern.

Secara bahasa, istilah “rasionalisasi” berasal dari kata Latin ratio, yang berarti akal atau perhitungan. Dalam konteks teori Max Weber, rasionalisasi merujuk pada proses di mana tindakan sosial dan struktur pemerintahan semakin didasarkan pada pertimbangan logis, efisiensi, dan aturan formal, bukan pada tradisi atau karisma pribadi.¹³ Penerapan prinsip ini terlihat jelas dalam sistem al-barīd yang dibangun oleh Baybars. Dengan jaringan komunikasi yang teratur dan terpusat, sultan dapat mengelola wilayah yang luas tanpa harus hadir secara fisik, mengurangi ketergantungan pada loyalitas personal dan memperkuat kontrol institusional. Informasi dari daerah dikirim secara berkala, diproses di pusat, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan melalui mekanisme yang dapat diprediksi dan diulang, sesuai dengan ciri dominasi legal-rasional yang dijelaskan Weber. Dalam konteks sejarah Islam abad ke-13, pendirian sistem pos ini menjadi langkah penting menuju efisiensi pemerintahan, karena memungkinkan negara Mamluk mengelola informasi, pejabat, dan kebijakan secara lebih sistematis dan terukur. Dengan demikian, al-barīd bukan hanya simbol keteraturan, tetapi juga instrumen rasionalisasi kekuasaan yang memperkuat fondasi birokrasi Islam klasik.

Walaupun al-Maqrīzī hanya membahas sistem al-barīd secara singkat dalam al-Khiṭaṭ, cara ia menyusun ceritanya menunjukkan pola pikir birokratis yang kuat. Ia menggambarkan Baybars sebagai pemimpin yang bisa menerima laporan dari Damaskus ke Kairo dalam waktu empat hari, lalu segera mengambil keputusan. Ini bukan sekadar pencapaian teknis, tapi menunjukkan bahwa komunikasi sudah menjadi bagian penting dari cara negara bekerja. Al-Maqrīzī juga menyebut bahwa hanya orang yang punya izin resmi dari sultan yang boleh menggunakan kuda pos, dan setiap stasiun dilengkapi dengan pengiring berkuda (sawwāqūn), logistik, dan keamanan. Artinya, ada aturan yang jelas dan sistem yang tertata. Menariknya, al-Maqrīzī tidak menulis ini sebagai fakta lepas, tapi menghubungkannya dengan sejarah panjang, dari Darius Persia sampai khalifah Abbasiyah, sebelum sampai ke Baybars. Ini menunjukkan bahwa ia ingin menempatkan Baybars dalam tradisi pemerintahan besar, sebagai pemimpin yang

¹² Weber, *Economy and Society*. hal. 956-958

¹³ Ibid., 24-26.

melanjutkan sistem administratif yang kuat. Dengan membaca teks ini secara lebih dalam, kita bisa melihat bahwa al-Maqrīzī sedang menunjukkan bahwa negara Islam abad ke-13 sudah punya cara berpikir birokratis: sistem komunikasi yang terpusat, berbasis aturan, dan mendukung kekuasaan negara. Ketika sistem ini runtuh setelah invasi Tamerlane, al-Maqrīzī mencatat bahwa negara pun ikut melemah. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya alat bantu, tapi bagian penting dari kekuatan dan stabilitas pemerintahan.

KESIMPULAN

Al-Maqrīzī menggambarkan sistem al-barīd pada masa Sultan Baybars sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang terorganisir dan berbasis otoritas resmi. Meskipun narasinya singkat, ia menekankan aspek efisiensi, hierarki, dan pembatasan akses, yang menunjukkan bahwa komunikasi telah menjadi bagian penting dari cara negara bekerja. Fungsi utama jaringan pos ini tidak hanya sebagai alat pengiriman pesan, tetapi juga sebagai sarana pengawasan administratif dan pengambilan keputusan yang cepat. Sistem ini memungkinkan sultan memantau kondisi wilayah secara langsung dari pusat pemerintahan, memperkuat kendali politik, dan menjaga stabilitas kekuasaan.

Pendirian jaringan pos oleh Baybars menjadi tonggak penting dalam perkembangan administrasi Islam abad ke-13 karena mencerminkan pergeseran menuju birokrasi yang rasional dan terstruktur. Dalam kerangka teori Max Weber, sistem al-barīd menunjukkan ciri dominasi legal-rasional, di mana kekuasaan dijalankan melalui aturan formal, pembagian tugas, dan dokumentasi yang sistematis. Dengan pendekatan ini, sistem komunikasi negara Islam dapat dipahami bukan hanya sebagai sarana teknis, tetapi sebagai fondasi institusional yang menopang efisiensi pemerintahan dan keberlanjutan otoritas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Elbendary, Amina A. "The Sultan, The Tyrant, and The Hero: Changing Medieval Perceptions of al-Zahir Baybars." *Mamlūk Studies Review*, The Middle East Documentation Center (MEDOC), 2001.
- Hajar, Imam Ibnu. "FROM ZERO TO HERO: THE HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE (1299-1566 AD)." *Proceeding of ADIA*, July 9, 2024.
- Rusfiana, Yudi, and Cahya Supriyatna. *MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGANNYA*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Siti Maryam, -. "Dinasti Mamluk di Mesir Penyelamat Peradaban Islam 1250-1517 M." Monograph. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2022.
- Srikiki, Srikiki, and Haidir Fitrah Siagian. "Komunikasi Politik dalam Sejarah Islam: Komunikasi Politik Rasulullah Saw." *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 2025.

Stowasser, Karl. *Al-Maqrīzī: Book of Exhortations and Useful Lessons in Dealing with Topography and Historical Remains (al-Khiṭaṭ). Parts I-II*. A compte d’auteur, Liège, Belgium, 2022.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978.

Yusuf, Mundzirin. “PERADABAN DINASTI MAMLUK DI MESIR.” *Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 2015.